

REDEFINISI PETANI: DISKURSUS INDONESIA *VIS-A-VIS* BARAT

REDEFINITION OF FARMERS: INDONESIAN DISCOURSE VIS-A-VIS WEST

M.Gunardi Judawinata*, Iwan Setiawan

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Ir Soekarno Km 21 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

*Email: gunardi.judawinata@unpad.ac.id

(Diterima 04-12-2022; Disetujui 11-01-2023)

ABSTRAK

Semakin tinggi konversi lahan pertanian, kejenuhan lahan, pelandaian nilai tukar petani, perkembangan teknologi budidaya, inovasi media bercocok tanam dan pendekatan usahatani, semakin membuat tidak jelas definisi petani. Pertanyaannya, apakah hal yang sama terjadi juga di dunia? Tulisan ini bertujuan untuk mendudukan evolusi definisi petani di Indonesia dengan perkembangan di dunia. Untuk itu digunakan paradigma konstruktivisme, metode penafsiran (hermeneutika), dan studi literatur. Sebanyak 50 literatur, baik buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang diterbitkan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, digunakan dalam literatur *review* ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa definisi petani di Indonesia belum memiliki justifikasi yang tegas, baik dari ahli, institusi maupun komunitas, sehingga berbeda-beda antar waktu dan antar ruang. Definisi petani di dunia bersifat konstan, karena berposisi sebagai sentral dan profesi yang setara dengan profesi lainnya, baik dalam hak dan kewajiban. Keragaman komoditas, sektor, sistem tanam (tanah-non tanah) dan posisi tawar usahatani cenderung mempertajam definisi petani. Oleh karena itu, definisi petani di Indonesia dikategorikan “cair” (liar), karena tidak mengakar, dan tidak berjustifikasi. Sebagai negara bekas jajahan kolonial, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara penjajah dan skema kolonisasi lanjut yang dioperasikan media maupun korporasi, sehingga rekonstruksi definisi maupun praksis petani menjadi keharusan karena bias-bias paradigma dan karakteristik petani telah membuat petani kehilangan otonomi, keberlanjutan serta rasa kemanusiaannya (humanism). Definisi petani tidak dibatasi ruang dan luas lahan, belum disepakati sebagai profesi dan labelnya digunakan secara terbuka.

Kata kunci: diskursus, redefinisi, petani

ABSTRACT

In Indonesia, the rising rate of agricultural land conversion and soil degradation, decreasing agricultural exchange rates, advancing technological and cultural development, and expanding innovations in planting mediums and farming approaches, have blurred the definition of a peasant. Does the same phenomenon happen worldwide? This paper aims to set the evolution of the definition of a peasant in Indonesia globally. This study departed from the constructivism paradigm, which used a hermeneutics approach and literature study method. More than 50 literature from the past century were studied. We found that in Indonesia, the definition of the peasant has not been strongly justified from many perspectives (experts, institutions, communities), which created disparities in space and time contexts. While peasant's global definition tends to be constant as it acts as the centre of the proposition just like other professions. Diversities in commodities, planting systems, and the bargaining position of farming as economic activity caused the specification of peasant's definition in Indonesia. Thus, the definition of the peasant is still "wild" without strong boundaries. As one of the former colonial countries, Indonesia cannot be separated from its colonial inheritance, which affected the media and corporations. We conclude that the reconstruction of peasants' definitions and praxis becomes a necessity because the biases of the paradigm and characteristics of peasants have made peasants lose their autonomy, sustainability and sense of humanity (humanism). The

definition of peasant is not limited to space and land occupied, it has not been agreed upon as a profession and the label is used openly.

Keywords: discourse, redefinition, peasant

PENDAHULUAN

Perspektif kolektif dari (Tekon, 1984), (Redfield, 1985), (Patong & Soehardjo, 1984), (Sajogyo, 1993), (Tjondronegoro, 1990), (Wolf, , 1983), (Soetrisno, 1999) dan (Margono Slamet, 2000) memandang petani sebagai: (1) orang yang seluruh kebutuhan kehidupannya dan sebagian atau seluruh mata pencahariannya didapat dari sektor pertanian; (2) orang yang bercocok tanam atau memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (3) orang yang menggarap tanah miliknya sendiri; (4) orang yang sebagian besar waktu, tenaga dan perhatiannya tercurah pada usahatani yang dilakukan pada sebidang lahan; (5) orang yang bercocok tanam berdasarkan otoritasnya; dan (6) pemilik dan penggarap lahan sempit yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Perspektif ekonomi memandang petani sebagai rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya bersumber dari hasil usahatani (Mubyarto, 1994). Perspektif pembangunan dari (Landsberger & Y. G, 1981) memandang petani sebagai orang yang mengendalikan

secara efektif sebidang tanah yang ia sendiri sudah lama terikat oleh relasi tradisi dan perasaan (rasa sayang). Perspektif sosiologi memandang petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian yang subsisten dan skala usahatani yang kecil (Ellis, 1988); (Sajogyo, 1993); (Tjondronegoro, 1990); (Soetrisno, 1999). Oleh (Redfield, 1985), (Ellis, 1988), (Scott, 1976) dan (Soetrisno, 1999), petani ini lebih identik dengan *peasant*, yakni orang yang memiliki lahan sempit dan memanfaatkan sebagian besar dari hasil usahatannya untuk kepentingan hidup mereka sendiri (*subsistance*).

Menurut Redfield (Mendras, 1995), sebagaimana Bahasa Inggris; Bahasa Perancis juga membedakan petani menjadi dua kelompok, yaitu: "*paysan*" (*peasant: Inggris*) dengan "*agriculteur*" (*farmer: Inggris*). Kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua kelompok tersebut adalah: otonomi (kemandirian), kolektifitas lokal, subsistensi, spesialisasi pekerjaan, pembagian kerja (misalnya usia dan jenis kelamin untuk "*paysan*"; pasar dan teknologi untuk "*agriculteur*"-pen.), saling kenal mengenal

(“*interconnaissance*”-pen.), penolakan terhadap orang luar dan ada atau tidaknya “mediasi” dengan pihak luar. Menurut (Kurnia, 2004), meskipun kriteria yang digunakan oleh Mendras kelihatan sangat sosiologis, namun secara eksplisit terkandung kriteria ekonomi (subsistensi) dan politik (hubungan dengan dunia luar).

Jika mencermati definisi-definisi petani di Indonesia hingga akhir abad ke-19, maka relatif tidak banyak berubah. Hal itu terjadi karena lahan pertanian belum banyak beralih fungsi, pertanian masih identik dengan pedesaan, perkembangan kota berjalan lambat, teknologi pertanian modern belum banyak diterapkan, pekerjaan non-formal pedesaan belum beragam, komoditas non-pangan belum banyak dikembangkan dan *urban farming* belum tumbuh di perkotaan. Definisi petani menjadi beragam dan tidak jelas seiring berkembangnya teknologi, pendekatan usahatani dan media bercocok tanam (tanah-non tanah). Membias seiring dengan melandainya nilai tukar petani, naiknya kapilaritas sosial, rendahnya penilaian generasi (*under value*) terhadap sektor pertanian dan menurunnya benefit usahatani yang dirasakan petani.

Ada kecenderungan, definisi petani mengalami pergeseran dan penajaman seiring berkembangnya usahatani

hortikultura, florikultur, *urban farming* dan komoditas khusus. Sejak sayuran, tanaman hias, jamur, paprika, tanaman obat, buah-buahan dan *agroforestry* dikembangkan secara massif awal abad 21, terminologi petani menjadi terspesialisasi. hingga akhir abad 20 hanya dikenal petani tanaman pangan (padi, jagung, singkong dan kedelai), maka sekarang dikenal banyak terminologi. Berdasarkan komoditasnya, dikenal petani sayur, petani jamur, petani bunga, petani kaktus, petani strawberry, petani kopi, petani manggis, petani salak, petani paprika, petani mangga dan sebagainya. Berdasarkan ruangnya, dikenal petani perkotaan, petani pinggiran kota, petani rawa, petani pinggiran hutan, petani lahan marginal, dan sebagainya.

Persoalannya, entitas dan komunitas ilmiah “tidak responsif” terhadap definisi-definisi petani yang cenderung liar. Pertanyaannya, bagaimana bisa definisi petani di Indonesia mengalami penajaman, sementara di dunia cenderung stagnan? Ada paradoks antara terminologi dan definisi petani di Indonesia dengan di dunia. Hipotesisnya, definisi dan terminologi petani di Indonesia hanya sebatas label (julukan, “landian”), bukan profesi, sehingga cenderung bebas dan terspesialisasi. Sedangkan definisi dan

terminologi petani di dunia merujuk pada profesi yang diakui oleh negara. Melekat sebagai identitas pekerjaan atau usaha yang teradministrasi oleh negara. Proposisinya, profesi petani memiliki posisi yang setara dengan profesi lainnya, baik segi hak maupun kewajiban. Pertanyaannya, apakah perbedaan dalam mendefinisikan dan memposisikan petani di Indonesia dengan di dunia terkait dengan besar persentasenya dalam struktur demografis negara?

Ada fenomena yang terbilang unik atau aneh terkait dengan komposisi petani di Indonesia. Pada saat situasi ekonomi mengalami krisis, angka petani meningkat dan bertani benar-benar menjadi profesi yang diandalkan. Tetapi begitu situasi ekonomi keluar dari krisis, grafik petani kembali menukik dan bertani kembali menjadi sampingan, bahkan ditinggalkan. Uniknya, ketika perhatian petani terhadap pertanian di ruang pedesaan melandai, justru di ruang perkotaan, pertanian dengan model lain (*urban farming*) tumbuh kembang dan dilembagakan. Pertanyaannya kemudian, apakah petani dan bertani di ruang pinggiran dan pedesaan ini profesi utama atau imperior? Lantas, bagaimana juga dengan petani dan bertani di perkotaan, apakah hobi atau profesi? Tulisan ini bertujuan untuk: (1)

mengkritisi dan mengoreksi definisi petani di Indonesia yang begitu cair; (2) memposisikan definisi petani Indonesia dalam kerangka definisi petani Eropa dan Amerika Serikat; dan (3) merekonstruksi atau meredefinisikan petani di Indonesia agar lebih manusiawi.

METODE PENELITIAN

Kajian berparadigma konstruktivisme ini didesain secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran (hermeneutika) dan studi literatur (*literature review*). Sebanyak 50 literatur yang terkait dengan definisi petani, baik buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang diterbitkan dalam kurun waktu 100 tahun terakhir (1900-2018), digunakan dalam literatur review ini. Literatur-literatur yang berhasil dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tahun terbit, topik tulisan, konteks tulisan, metode tulisan, negara tempat terbit dan indikator-indikator yang menjadi penciri dan pembeda definisi petani. Analisis literatur dilakukan dengan membandingkan definisi di Indonesia dan di dunia berdasarkan indikator yang diposisikan. Kajian dilakukan selama sembilan (9) bulan, mulai Januari-September 2019.

Menemukan makna sosial dalam sejarah bukan hal gampang, oleh karena itu diperlukan penafsiran atau interpretasi. Menafsir merupakan masalah kejelian, sehingga diperlukan proses dialog yang terus menerus. Tafsir-menafsir hasil penelitian orang lain menuntut peneliti menjadi bagian dari penelitian tersebut. Artinya, merupakan upaya mendudukan peneliti pada riset orang lain dan pada waktu yang sama harus mampu memisahkan diri dari orang lain. Teori hermeneutik fokus pada interpretasi persoalan-persoalan umum yang merupakan perpaduan fenomenologi dengan linguistik, semantik dengan kritik ideologi, dan strukturalisme dengan analisis konsep. Hermeneutik merupakan ilmu yang secara operasional membahas teori pemahaman bersama (*convergency*), interpretasi teks dan mempelajari penafsiran fakta dan data guna memahami masa lalu.

Penelitian sejarah (*historical method*) dibangun berdasarkan identifikasi, analisis, dan interpretasi teks-teks lama. Membangun teks-teks lama merupakan salah satu fungsi hermeneutika yang berupaya memahami teks dan menafsirkannya kepada orang lain. Saat menafsirkan, penting untuk mengetahui koneksi historis dan konteks teks yang

sedang dipelajari. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk memahami bagian-bagiannya (Spilackova, 2012). Membangun teks dan sumber di masa lalu merupakan pengetahuan tentang peristiwa sejarah dan pengetahuan tentang fakta dan proses sejarah. Untuk dapat membangun teks-teks sejarah berdasarkan sumber-sumber masa lalu, diperlukan metode penelitian sejarah. Berdasarkan teks-teks yang tertuang dalam sumber-sumber terkumpul definisi petani direkonstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara istilah, kata petani sudah melembaga di Indonesia, jauh sebelum konsep-konsep *peasant*, *farmer* dan *capitalism farm* diperkenalkan. Hal itu teridentifikasi dari catatan-catatan sejarah yang menyinggung mata pencaharian masyarakat kerajaan, baik di Sumatera, Sunda, Jawa, Bali, Makasar dan Maluku, yang menjadi guru (“bangsaning susatya” yaitu kaum petani yang rajin dan telaten-pen), prajurit, nelayan, bertani, beternak, berkreasi (pengrajin, seniman) dan berdagang. Bertani dan beternak identik dengan tani dan yang melakukannya disebut *pattani* (Melayu), *patani* (Sunda), *wong tani* (Jawa), *peladang* (Kalimantan), *pagalung* (Makassar), dan *pekebun* (Maluku, Papua). Jauh sebelum tanam

paksa, para pedagang Arab, Cina, Gujarat dan Eropa bertransaksi dengan para pedagang hasil tani, terutama untuk komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan (seperti gambir) dan rempah-rempah. Para pedagang Nusantara mendapatkan barang dagangannya dari para petani yang mengusahakan komoditas tersebut di ladang, kebun dan sawah (Raffles, 2008); (Vlekke, 2008); (Koentjaraningrat, 1982); (Mosher, A.T., 1965); (Teken, 1984); (Ekajati, 1984); (Wallace, 2015)).

Sejatinya, ketika penjajah kolonial Belanda, Inggris dan Portugis datang ke Nusantara, mereka telah menggunakan istilah *pattani* (Melayu). Ketika tanam paksa dioperasikan, mereka menyematkan kata *pattani* kepada warga pribumi yang tidak mengembangkan tanaman perkebunan. Sejak tanam paksa itulah mulai dikenal istilah buruh tani atau pekerja paksa, hal ini sejalan dengan pendapat bahwa petani merupakan bagian dari faktor politik atau bagian dari otokrasi pemerintah/penguasa (Shanin, 1972), dan keberadaan petani dianggap sering mengganggu perkebunan kolonial serta menghambat pekerja (buruh tani) kolonial, maka istilah “pattani” dilabel jahat, kotor dan perompak oleh kolonial (N.C. van Setten van der Meer, 1979).

Secara ilmiah, istilah petani tidak hanya direferensi dari bahasa Nusantara, tetapi juga diadopsi oleh para peneliti di perguruan tinggi dan di lembaga penelitian pertanian di Indonesia dari terminologi *peasant* dan *farmer* yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Tidak ada catatan yang pasti, siapa yang pertama kali melembagakan kata “petani”, tetapi jika dilihat dari umur referensi yang disitasi, maka (Mosher, A.T., 1965), (J. H. Boeke, 1983) dan (Teken, 1984) disinyalir sebagai yang memulainya.

Secara historis empiris, istilah petani yang digunakan oleh (Mosher, A.T., 1965), (J. H. Boeke, 1983) dan (Teken, 1984) tidak terlepas dari pengaruh definisi petani yang digunakan di Belanda dan Amerika Serikat. Dominasi dan kolonisasi lanjut yang dimanifestasikan dalam “pembangunanisme” memaksa mereka untuk memelihara petani yang berkonotasi *pejoratif* agar eksistensi “farmer” yang menjadi identitas tetap terjaga proposisinya, dengan memelihara petani (*peasant*), *farmer* tetap menjadi arus utama di negara dunia ketiga. Implikasinya, petani terus dijaga eksistensinya melalui bantuan irigasi, kredit dan subsidi input. Tujuannya, agar petani (*peasant*) nyaman berproduksi,

farmer nyaman mengeksploitasi. Sejatinya, berbagai kebijakan “yang tampak memihak” kepada petani, yang diimplementasikan selama ini, hanyalah kamufase belaka. Faktanya, kian hari kesejahteraan dan nilai tukar petani semakin lemah. Usahanya seperti peribahasa “lebih besar pasak dari pada tiang”: gerak harga hasil produksi petani merangkak, sementara biaya berbagai sarana melompat beberapa kali lipat.

Seperti asal usulnya, petani tidak berada di ranah perkebunan (*estate*), tetapi identik dengan pangan. Indikatornya terlihat dari makna subsistensi yang melekat kuat pada definisi petani (*peasant*), baik di Eropa, Amerika Serikat, serta makna sentimental yang disematkan penjajah kolonial kepada bangsa terjajah di negara dunia ketiga. Ironi, padahal arti denotasinya di Indonesia, *pattani* atau patani sudah lama lekat dengan pangan, hortikultura, ternak dan perkebunan. Secara historis, usaha mereka bukan sekedar pemenuhan kebutuhan (subsistensi), tetapi juga pemenuhan pasar lokal dan bahkan pasar dunia yang mengalir di Jalur Sutera (Soewardi, 1976). Penyempitan makna petani pada usahatani konsumtif (pangan), merupakan bentuk westernisasi atau kolonisasi lanjut (de Vries, 1985). Hal itu telah mengakibatkan

sulitnya mengadaptasi perkembangan usaha-usaha pertanian yang muncul kemudian, sebut saja usahatani jamur, bunga, buah naga, kaktus, kopi, manggis, pala, aren, jahe, dan sebagainya. Ironinya, secara spasial pun, kata petani hanya identik dengan palawija (padi, kedelai, ubi dan jagung) dan Pulau Jawa, sementara di luar Jawa menggunakan istilah yang berbeda.

Bias dan sempitnya kata petani membuat sulit mencari definisi yang pasti, yang konstruktif dan generik digunakan di Indonesia. Wajar jika (Moore, Barrington, 1966) menyatakan bahwa “tak mungkin mendefinisikan perkataan petani dengan ketepatan mutlak, karena batasannya memang kabur pada ujung kenyataan sosial itu sendiri”. Sejatinya, definisi petani “bukan kabur”, tetapi sengaja dikaburkan secara istilah, ilmiah dan praksis. Tragisnya, pada satu sisi ada konspirasi kolonisasi lanjut dibalik terminologi petani, di sisi lainnya masyarakat ilmiah dan komunitas-komunitas di negara dunia ketiga merasa nyaman dan menerima realitas tanpa membaca metafora “dominasi dan eksploitasi berkelanjutan” dibaliknya. Kecenderungannya, semakin presisi teknologi yang diadopsi, semakin kuat cengkeraman korporasi dan semakin

melembaga modernisasi (“pembangunanisme”), maka reduksi, dominasi dan eksploitasi atas petani semakin menjadi. Agar lebih berdasar dalam mencermati warna paradigma dan modus yang bersembunyi dibalik terminologi dan arti petani, mari kita bongkar secara kritis dan postmodernis makna dibalik metafora petani (Tabel 1).

Seperti kritik metodologis (Smith, 2012) yang kontemporer, (de Vries, 1985) sudah lebih awal menegaskan bahwa “sangat sedikit petani yang mengaku dirinya sebagai petani (profesi), tetapi orang luarlah yang melabel petani, terutama mereka-mereka yang berada di negara-negara sentral (penjajah). Sejatinya, de Vries ingin menegaskan bahwa petani (bukan *pattani* atau *patani*) merupakan label yang disematkan penjajah (kolonial) kepada orang yang menanam pangan (terutama padi) di

lahan-lahan sempit. (Lombard, 2005), (Wallace, 2015), (N.C. van Setten van der Meer, 1979), (Geertz, 1976), (Hayami & Kikuchi, 1987), (Collier, Santoso, Soentoro, & Wibowo, 1996) dan peneliti-peneliti petani di Jawa abad 19 dan abad 20, sesungguhnya memberi label dan definisi petani yang bias pada zona ekologi sawah dan tanaman pangan. Oleh karena itu, atribut-atribut yang dilabelkan kepada petani pun bias lahan sawah dan pangan. Ironinya, mereka tidak melakukan kajian pada lahan kering dan mengonstruksi konsep petani dari lahan kering yang berdaya juang tinggi, adaptif, menerapkan pola tanam tumpang sari, multifungsi dan agroforestri. Padahal, (Ekajati, 1984) menegaskan bahwa sebagian besar patani di zona ekologi tengah dan selatan Jawa mengusahakan komoditas non-padi, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 1. Paradigma, Definisi, Arus Utama dan Tokoh Dibalik Makna Petani

Paradigma	Definisi Petani	Arus Utama	Tokoh
I. Positivistik			
- Struktural Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Petani sebagai orang yang seluruh atau sebagian mata pencahariannya didapat dari sektor pertanian • Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya; • Petani adalah golongan masyarakat yang berdiri di daerah pasar dan kaki yang satunya lagi berdiri di daerah subsistensi • Petani adalah orang yang hidup dalam pola subsiten dan enggan berisiko (<i>safety first</i>) • Petani adalah manusia yang tergantung kepada pertanian, ditentukan terutama oleh hubungan mereka dengan tanah (<i>tata tanah</i>), oleh hubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian, • Pemenuhan kebutuhan • Moral ekonomi, • Rasionalitas ekonomi, • Etika subsistensi, • Tata tanah, • Tata kerja, • Tata kekuasaan 	J.H Boeke (1983) I.B Teken (1984), Redfield (1985), Ellis (1988) J. Scott (1976), Planck (1990) Soetrismo (1999)

Mimbar Agribisnis:

Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis

Januari 2023, 9(1): 1093-1110

Paradigma	Definisi Petani	Arus Utama	Tokoh
- Struktural Konflik	<p>pekerjaan mereka satu dengan lainnya (tata kerja), dan oleh sistem ekonomi dan masyarakat yang ada di atas mereka (tata kekuasaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petani sebagai orang desa yang bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota; • Petani adalah manusia yang mengendalikan energi matahari, suhu (iklim), lahan dan air untuk menumbuhkan tanaman dan mengembangkan hewan (ternak) sehingga berguna dan bernilai tambah; • Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu; • Petani adalah seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah yang ia sendiri sudah lama terkait oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan • Petani adalah orang yang tinggal di suatu tempat, mengolah lahan, bekerja “kasar dan bodoh”, anti perkotaan, anti industri, membelakangi modernitas (sedikit mekanis) dan imobilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam keputusan bertani (bercocok tanam) • Pengendali SDA, • Lahan sebagai ruang produksi dan media bercocok tanam 	<p>A.T Mosher (1965); Landsberger (1981), Anwas (1992); Henri Mendras (1995)</p>
2. Postpositivistik			
- Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Petani sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam; • Lahan atau ruang produksi lainnya bukan sekedar ruang produksi, tetapi juga memiliki relasi-relasi, nilai-nilai, emosi-emosi, sejarah dan konteks spesifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam keputusan bertani 	<p>Eric Wolf (1983) Henri Lefebvre (2000)</p>
- Strukturasi	<ul style="list-style-type: none"> • Petani sebagai orang yang memiliki lahan sempit dan memanfaatkan sebagian terbesar dari hasil pertaniannya untuk kepentingan mereka sendiri • Petani adalah “homo oeconomicos” yang bermoral dan rasional, yang akan terus berusaha memaksimalkan sumber daya dan kemakmuran sendiri tanpa memerdulikan moral pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan sempit • Etika subsistensi • Bermoral dan rasional; • Sumberdaya dan kemakmuran sendiri 	<p>Eric Wolf (1983) Popkin (1986), Hayami dan Kikuchi (1987) Wiradi (2009)</p>
- Konstruktivis	<ul style="list-style-type: none"> • Petani itu terlampau sedikit menyatakan diri sebagai petani, bahwa pengetahuan kita masih saja berasal dari pandangan luar, bukan pernyataan penuh dari petani sendiri; • Petani adalah <i>peasant</i> yang percaya pada diversifikasi, berakar di lokalitas, mempromosikan praktik ramah lingkungan, kolaboratif, otonom, memperjuangkan generasi masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani: label dari orang luar, bukan pengakuan. • <i>Peasant</i> baru 	<p>de Vries, Egbert (1985) Van der Ploeg (2018)</p>

Berdasarkan pada definisi-definisi petani pada Tabel 1, maka dapat ditegaskan bahwa paradigmanya sangat

didominasi oleh positivistik. Artinya, pengaruh dan dominasi pengaruh negara-negara dominan masih sangat signifikan.

Meskipun telah muncul definisi petani yang lebih berwarna postpositivistik, namun sifatnya masih berupa kritik-kritik yang belum mampu menggoyangkan dominasi, apalagi sampai mengganti. Jika dicermati lebih dalam, maka konsepsi petani yang dikemukakan oleh (Van der Ploeg, 2018) lebih berwarna paradigma *postmodern*. Indikatornya terlihat dari lokalitas, ramah lingkungan dan generasi muda. Ketiganya menjadi penciri dari otonomi atau kemandirian petani. Persoalannya, definisi petani belum akomodatif terhadap ragam ruang, ragam komoditas dan ragam media tanam. Definisi petani yang terbaru pun masih bias gender, bias pangan, bias lahan, bias produksi, bias status lahan dan sebagainya.

Belum tampaknya warna paradigma postmodern dalam definisi petani terlihat jelas dari masih dominannya praktik eksploitasi petani oleh negara yang menjadi sentral teknologi, oleh korporasi transnasional (TNCs) input produksi pangan dan oleh mafia global yang mengontrol pasar pangan dunia. Sejatinya, bukan harga input dan output yang dikendalikan kekuatan global, tetapi keseragaman pangan dan kenyamanan investasi agribisnis nonpangan, sebut saja perkebunan. Petani pangan juga terkait

dengan subsidi input dan asuransi, oleh karena itu, pinjaman dana dari lembaga keuangan global turut mengendalikan. Tegasnya, pelebagaan terminologi dan definisi petani yang lekat dengan pangan ternyata memberi banyak peluang kepada kekuatan-kekuatan yang mengendalikan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Ujung-ujungnya, sumber air dan irigasi pun menjadi sarana untuk mengeksploitasi petani pangan. Bahkan, secara ekonomi politik, eksistensi petani tidak terlepas dari modus eksploitasi politisi, ruang korupsi baru dan menjadi komodifikasi bagi para elit yang mengontrol dari perkotaan.

Implikasi-implikasi dari pemberian definisi dan ruang petani yang sempit (jika tidak disebut dipersempit) bersifat negatif terhadap nasib dan kehidupan petani Indonesia hingga sekarang. Petani diidentikan dengan pangan (terutama padi), pulau Jawa dan lahan sempit. Sehingga perhatian dan kebijakan (termasuk revolusi hijau) hanya ditujukan kepada petani pangan, dengan prioritas Pulau Jawa. Sedangkan petani lahan kering dan pinggiran hutan, baik yang di Pulau Jawa maupun pulau Indonesia lainnya, terabaikan. Lahan sempit menjadi standar utama dalam definisi petani, yang diikuti dengan subsistensi dan miskin. Padahal, lahan sempit di zona ekologi

lahan kering dengan komoditas manggis, pepaya, kelapa, bunga, tanaman hias, tanaman rempah dan sebagainya, bisa menghasilkan *profit* dan *benefit* secara berlipat. Hidup sejahtera, dengan pola tanam yang adaptif dan berkelanjutan. Ada indikasi, gambaran petani lahan sempit di zona lahan kering sengaja tidak diakomodasi agar seluruh struktur dan kebijakan tercurah pada petani pangan. Mirip seperti apa yang dipaparkan oleh (N.C. van Setten van der Meer , 1979) tetapi ruangnya diperluas dari kasus di Pantura Jawa ke lingkup Indonesia.

Generalisasi (positivistik) definisi petani dari Eropa dan Amerika ke Indonesia dan negara-negara di Asia telah dengan sendirinya mereduksi makna petani atau petani yang spesifik, sehingga menimbulkan kekeliruan terhadap kebijakan dan upaya pengembangannya. Implikasinya, berbagai input luar (yang umum diterapkan oleh petani (*peasant or farmer*) di Eropa dan Amerika Serikat, dipaksa terapkan pada petani Indonesia dan Asia. Ironi, lahannya sempit (kurang dari 0,25 hektar), tetapi input luarnya sangat padat. Alokasi inputnya untuk gandum, jagung dan kedelai di Eropa dan Amerika, dialokasikan untuk padi di Indonesia. Akhirnya, selama Indonesia merdeka, perhatian semua pihak, baik

pemerintah, petani, pelaku bisnis, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan media tercurah pada pangan, terutama padi. Sementara ekosistem petani di lahan kering, lahan rawa dan luar Jawa dibiarkan digarap oleh korporasi (*capitalism farm*). Digarap oleh investor atau petani model Eropa dan Amerika Serikat yang sejatinya. Merekalah *peasant* atau *farmer* yang sebenarnya, karena ciri-ciri petani yang melekat di Eropa dan Amerika Serikat ada pada mereka. Inilah sisi lain dari definisi petani yang harus dikoreksi (Tabel 2).

Mencermati ciri-ciri petani (Tabel 2), maka sulit (tampak tidak pas) mendudukan karakteristik petani Indonesia pada ciri-ciri yang dimiliki petani Eropa dan Amerika Serikat. Persoalannya, sejarah dibuat oleh entitas yang sedang berkuasa, sehingga ciri-ciri petani Eropa dan Amerika Serikat dijejalkan (baca: dipaksakan) ke Indonesia, bahkan ke Asia Tenggara (de Vries, 1985). Beberapa ciri yang lain diterapkan kepada petani Indonesia dan negara-negara dunia ketiga secara sentimental. Sebagai catatan, (Rogers, 1969) memberikan karakteristik “*Peasant*” sebagai berikut: saling curiga satu sama lain (*mutual distrust*), cenderung mempercayai pemikiran bahwa

segala hal yang didambakan dalam hidup sudah tersedia (*limited good*), ikatan kekeluargaannya tinggi (*familistik*), kurang inovatif (*lack innovativeness*), fatalisme, lokalit dan relatif rendah empati (*low empathy*). Ciri-ciri tersebut sangat

bias dominasi dan hegemoni negara sentral. Hal ini pun harus dikoreksi, karena ciri-ciri petani di negara sentral tidak bisa disamakan dengan negara-negara seberang lautan.

Tabel 2. Ciri-ciri Petani Indonesia Vis a Vis Eropa dan Amerika Serikat

No	Karakteristik	Petani Indonesia	Petani Eropa dan Amerika Serikat
1	Skala Usaha	Sempit (< 1,0 Ha)	Sempit (< 25 Ha)
2	Komoditas	Bias Pangan	Umum
3	Input Luar	Padat	Padat
4	Alat Mesin	Medium	Penuh
5	Tenaga Kerja	Padat	Minim
6	Otonomi	Tidak Ada	Penuh
7	Orientasi Usaha	Subsisten	Komersial
8	Spesialisasi	Tidak Jelas	Jelas
9	Ruang	Bias Agroekosistem Sawah	Semua Agroekosistem
10	Pembagian Kerja	Komunitas dan Teknologi	Teknologi dan Pasar
11	Keterbukaan	Terbuka	Eksklusif
12	Relasi	Bermuka Dua	Banyak dan Beragam
13	Terminologi	Generalisasi	Khas (Spesifik)
14	Peran	Juru Tani (Mesin Produksi)	Pengelola (Manager)
15	Nilai-nilai	Orientasi Tradisi	Orientasi Teknologi dan pasar
16	Rasionalitas	Sosial dan Moral	Teknis dan Ekonomi

(Sumber: Mosher, 1989; Mendras, 1995); (Deleage, 2005)

Sebagai insan ekonomi, petani adalah insan ekonomi yang sama rasionalnya dengan insan ekonomi lainnya. Petani lekat dengan budaya subsisten karena faktor ekosistem yang kurang mendukung, sehingga sulit berhubungan dengan pasar (Arif, 1995). Berdasarkan tenaga kerjanya, (Currie, 1981) membedakan petani menjadi dua golongan. Pertama, petani *capitalis* (mereka yang lebih mengandalkan tenaga kerja yang disewa dan buruh tani yang diupah). Pemilik secara leluasa dapat memilih dan menentukan input-input yang diperlukannya dalam upayanya

memaksimalkan hasil maupun pendapatannya; dan Kedua, *peasant* adalah petani yang lebih mengandalkan pada penggunaan tenaga keluarga sendiri, dengan atau tanpa melibatkan tenaga kerja upahan luar keluarga yang lebih bersifat suplementer. Biasanya, *peasant* tidak jarang berusaha memperoleh hasil tambahan sebagai buruh tani atau memanfaatkan waktu senggangnya ke dalam berbagai kegiatan *off-farm* seperti berdagang, tukang atau pengrajin sesuai dengan kemampuannya.

Batasan definisi dan ciri-ciri petani tersebut tampaknya sudah tidak berlaku

hari ini di tanah Jawa. Petani-petani pangan hari ini semakin terautkan dengan berbagai sumber modal dan pasar. Tegasnya, semua petani sudah komersial, sehingga sulit membedakan antara *peasant* dan *farmers*. Persoalannya, meskipun petani menjual (memasarkan) sebagian (semi komersial) atau seluruh hasil taninya (komersial), namun seluruh hasil penjualannya digunakan lagi untuk menutup utang bekas biaya produksi, digunakan untuk biaya produksi selanjutnya dan sisanya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari (baca: beras miskin atau beras sejahtera). Pertanyaannya, apakah petani (*peasant*) tersebut masih layak dilabel subsistensi dan atau sudah layak dilabel komersial? Ambiguitas petani tersebut menarik untuk dicermati, karena satu kakinya berdiri di sisi subsistensi, sementara kaki lainnya berdiri di sisi komersial semu. Dikatakan komersial semu, karena orientasi komersialnya kembali kepada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi).

Pada kenyataan sosial, definisi dan ciri petani semakin rumit, terutama dikaitkan dengan status lahan. (Landsberger & Y. G, 1981), (Wiradi & et.all, 2009) dan (Sajogyo, 1993) membedakan petani berdasarkan status kepemilikan dan perusahaan lahannya

menjadi empat, yaitu: 1) petani pemilik penggarap, yakni petani yang memiliki lahan sekaligus mengerjakan usahatannya di lahan tersebut; 2) Petani penyewa, yakni petani yang melakukan usahatani pada lahan milik orang lain yang disewanya untuk petani yang melakukan usahatani pada lahan milik orang lain yang disewanya untuk waktu tertentu; 3) Petani penggadai, yakni petani yang mengusahakan usahatannya pada lahan milik orang lain yang digadainya pada waktu tertentu; dan 4) Petani penggarap, yakni petani yang menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko.

Kemudian, beberapa ahli seperti Teodor Shanin dalam (Sajogyo, 1993) memasukan pula buruh tani (tunakisma) ke dalam golongan petani ini. Menurut (Scott, 1976) dan (Soewardi, 1976) menyatakan bahwa perilaku petani pada berbagai status kepemilikan dan perusahaan lahan cenderung berbeda-beda.

Rekonstruksi Petani

Definisi dan atribut petani (*peasant*) sebagaimana berlaku di Eropa dan Amerika Serikat tidak memadai digeneralisasi di Indonesia dan di Asia pada umumnya. Selain sejarah, karakteristik dan kebijakan agrarinya

yang berbeda, juga tidak steril dari dominasi dan kolonisasi. Proposisinya bukan anti modernisasi, tetapi misi pembangunanisme selalu berambisi untuk mereduksi orisinalitas dengan inovasi dan teknologi hegemoni. Disebut ambisi, karena tidak tanggung-tanggung mencitrakan *pattani* dan petani identik secara meyoratif dengan kekumuhan, kejahatan dan perompakan. Standarisasi konsepsi dan definisi petani ala westernisasi pada umumnya negatif terhadap lokalitas, bahkan berstandar ganda. Positif ke negara sentral (negara maju), namun negatif ke negara seberang lautan (dunia ketiga).

Definisi-definisi petani yang berkembang dan dimapankan hingga awal abad 21 sangat bias lahan dengan skala kecil, padahal media tanam dalam pertanian era revolusi industri 4.0 tidak hanya tanah, ada banyak media non tanah, termasuk udara (*aerophonic*) dan air (*hydrophonic*). Skala usahatani kecil bukan lagi menjadi batasan ketika ruang usahatani didesain dalam bentuk rumah kaca (*green house*), *vertical farm*, *plant factory* dan *floating farm*. Bahkan, dengan komoditas unggulan dan spesifik (khusus), lahan skala kecil pun dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi

petani abad 21. Definisi yang adaptif dengan dinamika ruang produksi, media tanam, ragam komoditas, skala usaha, gender, wilayah (*spatial*), teknologi, lokalitas, ekosistem dan kemanusiaan.

Paradoks dengan itu, petani-petani yang selama ini definisinya identik dengan komoditas pangan, berbasis media tanam lahan skala kecil dan dikontrol (dibelenggu) oleh kendali kekuasaan (kebijakan) dan dominasi korporasi, baik melalui subsidi modal, input dan harga, tidak banyak mengalami perbaikan. Semakin banyak intervensi terhadap petani, semakin tidak mandiri (*dependence*). Alih-alih menjadi tinggi nilai tukar dan kesejahteraannya, eksistensi petani malah menukik, sehingga dinilai rendah oleh generasi. Kian hari, nasib petani kian subsistensi dan dieksploitasi. Mungkin karena angka petani pangan masih signifikan, sehingga belum dipandang perlu untuk dilindungi dan dijadikan sebagai profesi yang nilai sosial ekonominya tinggi. Petaninya tidak dilindungi, haknya tidak digaransi, tetapi ditekan oleh kekuasaan melalui kewajiban-kewajiban nasional yang memperdalam subsistensinya.

Perspektif *postmodern* memandang petani secara manusiawi (*humanism*) sebagai orang (laki-laki atau perempuan)

yang menumbuhkan (*grower*) dan mengelola pertanian pada berbagai ruang dan media produksi, baik secara alami (sawah, ladang, kebun) maupun direkayasa (*vertical farm, floating farm, hydroponic, aquaphonic, aeroponic*) untuk mengembangkan berbagai komoditas (pangan dan non pangan) adaptif (spesifik lokal), yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (subsistensi) maupun pasar (komersial). Petani adalah orang yang memiliki kewenangan penuh (otonom) dalam memutuskan dan menentukan pilihan ruang, komoditas, input, dan olahan untuk mengelola secara produktif dan berkelanjutan ruang produksinya (lahan dan non lahan). Petani adalah orang yang mengakui sendiri profesinya dan menjalin relasi dengan berbagai pihak sebagai wujud keberdayaan dan kemandiriannya.

Petani masa depan adalah generasi muda dari berbagai ruang (perkotaan-pedesaan), yang terdidik dan berkeahlian (*agrotechnotalent*), yang menumbuhkan dan mengelola pertanian (pangan dan non pangan) spesifik lokal bernilai tinggi pada berbagai ruang dan media produksi (lahan atau non lahan), yang menghargai lokalitas dan kearifan, yang tidak bias ruang di wilayah (*spatial*), yang terbuka terhadap dunia luas secara fisik maupun

virtual, yang disruptif (berjaringan, berbagi dan berkolaborasi), yang ramah terhadap lingkungan (*ecofacture*), yang memiliki adaptasi dan internalisasi teknologi lokal-global (*glocalism*), yang menjaga keharmonian sistem (*ecosystem, sociosystem* dan *geosystem*), yang menjaga keberlanjutan (*hollistically*) dan yang memanusiakan manusia (*humanism*).

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Definisi petani di Indonesia dikategorikan cair (liar), karena tidak mengakar dan tidak berjustifikasi. Terminologinya diserap dari konsep petani (*peasant*) yang digunakan di Eropa dan Amerika Serikat, yang karakteristiknya sangat berbeda dengan petani di Indonesia. Secara historis empiris, Indonesia sendiri telah memiliki konsep lokal yang terinternalisasi “pattani atau patani” yang diserap dari bahasa Melayu, Jawa dan Nusantara. Definisi petani di Indonesia bias komoditas pangan (terutama padi), bias lahan yang sempit, bias pemenuhan kebutuhan hidup (subsistensi) dan bias agroekosistem sawah; (2) Penyerapan dan formalisasi kata petani dari negara sentral (Eropa dan

Amerika Serikat) ke negara jajahan terjadi melalui perguruan tinggi, modernisasi dan industrialisasi yang menjadi muatan pembangunanisme. Generalisasi petani ala negara maju ke Indonesia telah membiaskan definisi petani secara regeneratif. Padahal, karakteristik lahan sempit di negara sentral dengan di Indonesia sangat bertolak belakang. Sebagai negara bekas jajahan kolonial, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara penjajah dan skema kolonisasi lanjut yang dioperasikan media dan korporasi; dan (3) rekonstruksi definisi dan praksis petani menjadi keharusan, karena bias-bias paradigma dan karakteristik petani telah membuat petani kehilangan otonomi, keberlanjutan dan kemanusiaan (*humanism*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A. (1992). *Ilmu Usahatani*. Bandung: Alumni Cetakan ke II.
- Arif, B. (1995). *Fungsionalisasi KUD dalam Melestarikan Swasembada Pangan dalam menyongsong Era Agribisnis PJP II (Kasus di Pantai Utara Jawa)*. Bandung: Pusat Dinamika Pembangunan Unpad.
- Collier, W. L., Santoso, K., Soentoro, & Wibowo, R. (1996). *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Currie, J. (1981). *The Economic Theory of Agricultural Land Tenure*. London: Cambridge University Press.
- de Vries, E. (1985). *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia.
- Deleage, E. (2005). *La fin des paysans: Mythe ou realite?* Rennes: UMR 6590-ESO, Colloque Faire Campagne, Chercheur au Laboratoire d'analyse socio-anthropologique du risque (Université de Caen).
- Dzulfi Agira Pratama. (2012). *Profil Petani di Pinggiran Kota. Skripsi*. Jatinangor: Fakultas Pertanian UNPAD.
- Ekajati, E. S. (1984). *Masyarakat Sunda dan kebudayaannya*. Jakarta : Girimukti Pasaka.
- Ellis, F. (1988). *Peasant Economics, Fann Housholds and Agrarian Develop-ment*. New York: Cambrige University Press.
- Eva Amaliyah Fikriani. (2012). *Potret Petani Padi di Lahan "Tidur" Kota. Skripsi*. Jatinangor: Fakultas Pertanian UNPAD.
- Geertz, C. (1976). *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hayami, Y., & Kikuchi, M. (1987). *Lingkar Setan Kemiskinan dan Shared Poverty*. Jakarta: LP3ES.
- Hessie, R. (2009). *ANALISIS PRODUKSI DAN KONSUMSI BERAS DALAM*. Bogor: DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN IPB.
- J. H. Boeke. (1983). *Prakapitalisme Asia*. Jakarta: Sinar Harapan, Anggota IKAPI, Bekerjasama dengan Yayasan Tani Atsiri Wangi .
- Kahwati, L. C., & Kane, H. L. (2019). *Qualitative Comparative Analysis in Mixed Method Research and Evaluation*. London: SAGE Publications, Inc; 1 edition (.

- Kartono, K. (1992). *Psikologi Wanita Jilid I*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasryno, F. (1984). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1982). *Antropologi Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurnia, G. (1986). *Régénération de Paysan*. Paris: Une Thèse de Doctorat Université Paris X Nanterre.
- Kurnia, G. (2004). *Petani Pejuang yang Terpinggirkan*. Bandung: Makalah Disampaikan dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Padjadjaran.
- Kurniati, E., & Hawa, L. (2003). Studi Kesiapan Petani Untuk Melaksanakan Pengelolaan Usahatani Melalui Pendekatan Ekonomi Sebagai Perusahaan Pertanian. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 15*.
- Landsberger, H., & Y. G, A. (1981). *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Lefebvre, H. (2000). *The Production of Space*. New York: Georgetown University Press.
- Linda Tuhiwai Smith. (2012). *Buku Google: Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Retrieved from Books Google: www.zedbooks.co.uk
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya (Le carrefour javanais. Essai d'histoire globale)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Margono Slamet. (2000). *Pemberdayaan Manusia Menuju Masyarakat Madani. Dalam Prosiding Seminar Nasional. Kerjasama Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan PPS-IPB dengan Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI)*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Mendras, H. (1995). *Les sociétés paysannes : éléments pour une théorie de la paysannerie*. Paris: Armand Colin.
- Moore, Barrington. (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making*. Boston : MA: Beacon Press.
- Mosher, A. T. (1965). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Djakarta: CV. Yasaguna.
- Mosher, A.T. (1965). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Djakarta: CV. Yasaguna.
- Mubyarto. (1994). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- N.C. van Setten van der Meer . (1979). *Sawah cultivation in ancient Java Aspects of development during the Indo-Javanese period, 5th to 15th century* . Canberra: Oriental Monograph Series no.22 Faculty of Asian Studies in association with Australian National University Press.
- Nugraha, A., & Herawati, R. (2015). Menguak Realitas Orang Muda di Sektor Pertanian Perdesaan. *Jurnal Analisis Sosial Volume 19 Nomor 1 Edisi Agustus 2015*.
- Patong, D., & Soehardjo, A. (1984). *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Ujung Pandang.: Universitas Hasanuddin.
- Planck , U. (1990). *Sosiologi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Popkin, S. (1986). *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Raffles, T. S. (2008). *The History of Java*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Redfield, R. (1985). *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: CV. Rajawali .
- Rodjak, A. (2006). *Manajemen Usahatani*. Bandung: Pustaka Giratuna.

- Rogers, E. (1960). *Social Change in Rural Society. A textbook in Rural Sociology*. New York: Appleton Centuri Crofts, Inc.
- Rogers, E. (1969). *Modernization Among Peasants. The Impact Of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Sajogyo. (1993). *Agriculture and Industrialization in Rural Development in Dirkse et.al (eds): Indonesia's Experiences Under the New Order*. Leiden: KITVL Press.
- Sajogyo, & Pudjiwati, S. (1980). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, J. (1976). *The Moral Economy of The Peasant*. London: Yale University Press.
- Setiawan, I. (2012). *Dinamika Pemberdayaan Petani*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Setiawan, I. (2018). *Pertanian Postmodern*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Shanin, T. (1972). *Peasants and Peasant Societies*. August 30th 1972 by Penguin Books.
- Sisworo, W. (2006). *Swasembada pangan dan pertanian berkelanjutan tantangan abad dua satu: Pendekatan ilmu tanah tanaman dan pemanfaatan iptek nuklir*. Jakarta: Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- Soetrisno, L. (1999). *Pertanian Pada Abad 21*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Soewardi, H. (1976). *Respons Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spilackova, M. (2012). Historical Research in Social Work-Theory and Practice. *ERIS web journal* (http://periodika.osu.cz/eris/dok/2012-02/04_historical_research_in_social_work.pdf).
- Sugiyanto. (1996). *Persepsi Masyarakat tentang Penyuluhan Pembangunan dalam pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Sumardjo. (1999). *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Petani*. Disertasi. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB.
- Teken, I. (1984). *Meningkatkan Taraf Hidup Petani kecil: Makalah disampaikan Dalam Diskusi Panel Hari Jadi Fakultas Pertanian Unpad Ke-25*. Bandung: Fakultas Pertanian Unpad.
- Tita Nuraini. (2017). *Karakteristik Petani Padi Sawah*. Jatinangor: Fakultas Pertanian UNPAD.
- Tjondronegoro, M. (1990). *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Prisma.
- Van der Ploeg, J. (2018). *The New Peasantries : Rural Development in Times of Globalization*. London: Taylor & Francis Ltd.
- Vlekke, B. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Samsudin Berlian (Penerjemah) Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wallace, A. R. (2015). *Sejarah Nusantara (The Malay Archipelago*. Yogyakarta : IndoLiterasi.
- Wiradi, G., & et.all. (2009). *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wolf, , E. R. (1983). *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Diterjemahkan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Rajawali Pers.
- Yans Michael Godfried Rony Basa Hutagalung. (2016). *Kajian Usahatani Padi Sawah*. Jatinangor : Fakultas Pertanian UNPAD.